

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

### 2.1.1 Juli

- Pada Juli 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 3,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,13 .
- Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,96 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,20 persen; kelompok transportasi sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,58 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,94 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,73 persen.
- Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,03 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,98

### 2.1.2 Agustus

- Pada Agustus 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,16 .
- Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,79 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,34 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,2 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,94 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,14
- Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,89 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,07

### 2.1.3 September

- Pada September 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 2,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,28.
- Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,19 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,12 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,04 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,29
- Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,11 persen dan tingkat inflasi *year to*

*date (y-to-d)* sebesar 1,19

Sebagai respon terhadap resiko dan tantangan pengendalian inflasi Kabupaten Sumbawa di tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa terus melakukan upaya pengendalian harga, baik melalui rapat *High Level Meeting (HLM)*, forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Program kerja TPID ke depan akan ditunjukkan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, harga, distribusi dan ekspektasi. Aspek ekspektasi Masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, publikasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi dari pelaku ekonomi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### Ketersediaan Pasokan :

1. Meskipun terjadi kenaikan harga beras, kondisi stok masih tercukupi, kenaikan harga diketahui berasal dari produsen di hilir yang menaikkan harga jual
2. Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu Langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan harga bahan pangan, serta sebagai upaya pengendalian inflasi.
3. Konsumsi ikan di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi maupun deflasi secara keseluruhan
4. Inflasi komoditas hortikultura seperti tomat, cabai dan bawang cenderung meningkat pada musim penghujan

### Keterjangkauan Harga :

1. Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama inflasi di Kabupaten Sumbawa sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras bawang merah dan bawang putih, cabai merah dan cabai rawit, ikan tongkol, serta kelompok AP terutama angkutan udara. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak di konsumsi Masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi.

### Kelancaran Distribusi :

1. Identifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi di Kabupaten Sumbawa. Wilayah seperti Jawa dan Bali memiliki dampak langsung terhadap inflasi di Kabupaten Sumbawa melalui perantara atau faktor lain seperti tarif angkutan udara

### Komunikasi Efektif

1. Koordinasi yang optimal dari berbagai stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu.
2. Melibatkan masyarakat melalui forum interaktif untuk berbagai praktik dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**Upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa (TPID Kab. Sumbawa) berupa kegiatan melakukan pengendalian inflasi diantaranya :**

1. Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam upaya menekan harga pangan dasar seperti beras, gula dan minyak dalam memitigasi dampak kenaikan harga pangan terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa bersama Sekretariat daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Sumbawa di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa;
2. Mengikuti Kegiatan *Capacity Building* di Kota Semarang Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian inflasi di Provinsi NTB yang didukung melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB;
3. Rapat Koordinasi Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga serta Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah bersama Bank Indonesia;
4. Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, khususnya terkait stabilisasi harga beras, yang dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama kemendagri, Kepala Daerah dan Kepala Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Rapat Koordinasi dalam rangka Pembahasan *Roadmap* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;
6. Rapat Koordinasi melalui Zoom Meeting dalam rangka Pengendalian Inflasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 khususnya terkait stabilisasi harga beras;
7. Rapat Koordinasi terkait Pengendalian dan Pengawasan distribusi LPG 3Kg bersubsidi;
8. Rapat Konsolidasi dalam rangka mendukung dan memastikan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan penyerapan bahan pangan produk local.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Untuk mengendalikan laju inflasi, ditekankan TPID harus bersinergi dan konsisten dalam melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok secara umum, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil Langkah dalam mengantisipasi apabila terjadi lonjakan harga maupun kurangnya bahan pangan, salah satunya sengan melakukan operasi pasar. Demikian halnya dengan satgas pangan untuk konsisten melaporkan harga dan ketersediaan komoditas secara berkala.
- Dari hasil pemantauan ke dua (2) pasar, memang terjadi perbedaan harga beberapa komoditas pangan pokok antara Pasar Seketeng dan Pasar Labuhan. Namun perbedaan harga tersebut sedikit, tidak begitu ekstrem atau tajam. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan stok bahan pangan diklaim telah mencukupi, bahkan untuk harga cabai mengalami penurunan harga. Meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut masih diatas ambang toleransi.
- Melakukan upaya normalisasi harga beras melalui program SPHP secara massif bersama Perum Bulog, serta mendorong realisasi penyaluran bantuan pangan 2025.
- Melaksanakan pemetaan stok pangan dikabupaten/kota untuk memetakan daerah surplus dan defisit stok pangan sebagai basis data penyediaan pangan sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;

- Pemerintah Daerah melalui TPID perlu memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok setiap hari. Beras, jagung, cabai, bawang, daging, telur, gula, hingga minyak goreng harus terus dipantau agar pasokan tetap aman dan harga stabil;
- Meningkatkan Intensitas koordinasi antar instansi terkait maupun lintas sektoral pada pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan masyarakat;
  - Perlu dilakukan operasi pasar dalam kondisi tertentu untuk barang-barang yang mengalami kenaikan harga agar terjangkau oleh masyarakat, dan perlu dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada komoditi yang stoknya berlebih dan mengalami penurunan harga (seperti gabah dan jagung). KAD dapat difasilitasi oleh Bank Indonesia, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik yang harus diprioritaskan;
  - Dinas Ketahanan Pangan memantau dan melaporkan 12 komoditas nasional dan memanfaatkan Gudang DKP melalui kemitraan dengan Bulog dalam upaya mendukung Bulog melakukan penyerapan jagung petani;
  - Sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah, BUMN/BUMD terhadap komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih dalam stabilisasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi;
  - Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menyangkut hajat hidup dasar masyarakat, sehingga harga pangan tidak boleh mahal. Semua masyarakat dari strata ekonomi apapun harus bisa menjangkau harga pangan terutama beras, ketahanan pangan tidak hanya dimaknai ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan harga. Semua masyarakat Kabupaten Sumbawa harus bisa makan makanan bergizi yang terjangkau.
  - Mengintensifkan SIANDINI (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi) melalui [siandini.sumbawakab.go.id](http://siandini.sumbawakab.go.id);
  - Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan dan pengawasan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional rutin dan di upload di website SIANDINI setiap hari Selasa dan Kamis, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas dan Langkah antisipasi dini peringatan kondisi inflasi atau lonjakan harga.

##### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pengembangan dan peningkatan SIANDINI;
- Pengintegrasian data menjadi Big Data dalam SIANDINI mulai dari hulu sampai konsumen untuk system pendukung Keputusan yang lebih efektif, efisien, dan komprehensif;
- Sinkronisasi data harga pangan dan ketersediaan potensi pangan masing-masing wilayah sehingga dapat menyajikan informasi terintegrasi terkait pangan baik di tingkat produsen (potan/gapoktan) sampai pedagang yang dapat bermanfaat baik oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan Keputusan serta dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lain maupun Masyarakat;
- Pemerintah perlu mengoptimalkan data komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga secara harian dan mingguan;
- Pemetaan stok pangan, distribusi dan konsumsi yang intensif melakukan sinkronisasi data antar instansi dan peningkatan koordinasi antar instansi;
- Optimalisasi Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan dengan dukungan digital market;
- Penguatan kapasitas petani;
- Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan peningkatan jalan untuk

mendukung arus distribusi barang dan jasa pada jalan strategis kabupaten yang rusak berat.